

**MANFAAT KORELASI SNI-HS 2013 DALAM RANGKA MENDUKUNG  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SNI**  
*Benefits of Correlation SNI-HS 2013 in Order to Support Development and  
Implementation of SNI*

**Endi Hari Purwanto dan Biatna Dulbert Tampubolon**

Puslitbang Badan Standardisasi Nasional  
Gd.Mangala Wanabakti Blok 4 Lt.4, Jl.Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia  
e-mail: endi@bsn.go.id dan dulbert@bsn.go.id

Diterima: 27 Februari 2014, Direvisi: 6 Juni 2014, Disetujui: 9 Juni 2014

**Abstrak**

Pertumbuhan jumlah SNI yang cepat dengan rata-rata 370 SNI per tahun terjadi dalam dua tahun terakhir. Kodefikasi *Harmonize System* (HS) di Indonesia sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dilakukan revisi per 5 tahun. Perubahan tersebut mengubah seluruh sistematika korelasi SNI-HS yang telah disusun sehingga hasil korelasi SNI-HS 2007 sudah tidak mutakhir (*update*). Selain mengakomodasi perubahan tersebut, penyusunan korelasi ini membantu dan memudahkan pengambilan kebijakan standarisasi terkait dengan industri dan perdagangan. Penelitian ini memiliki tujuan menyusun korelasi SNI-HS yang valid sebagai alat pendukung pengembangan dan penerapan SNI di Indonesia. Untuk mendapatkan korelasi SNI-HS yang valid digunakan prinsip kesamaan jenis produk atau komoditi antara SNI dan HS yang akan dikorelasikan. Metode yang digunakan adalah dengan menyandingkan antara kode SNI dengan kode HS yang memiliki definisi produk yang sama atau mendekati kemudian korelasi SNI-HS yang dihasilkan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesesuaian/ketepatan antara produk SNI dengan produk HS meliputi: prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Dari 4300 SNI produk yang teridentifikasi dihasilkan 959 korelasi SNI-HS terverifikasi valid (22,3%) yang terdiri atas: 205 korelasi dengan prioritas 1, 444 korelasi dengan prioritas 2 dan 310 korelasi dengan prioritas 3. Selain itu SNI-HS bermanfaat bagi pengembangan SNI yaitu: 1) Alat identifikasi produk dengan nilai impor tinggi, 2) Alat identifikasi gap ruang lingkup SNI produk dibandingkan dengan variasi produk dalam HS melalui penyusunan PNPS, dan 3) Alat identifikasi peluang ancaman dan kekuatan melalui notifikasi masuk. Terakhir SNI-HS memberikan manfaat bagi penerapan SNI berupa: 1) Alat identifikasi kode HS dari SNI produk yang akan diwajibkan dan 2) Alat identifikasi ketersediaan LSPro dari suatu produk dengan nilai impor tinggi.

**Kata kunci:** *Harmonize System* (HS), korelasi SNI-HS, pengembangan SNI, penerapan SNI.

**Abstract**

*Growth in the number SNI very rapidly with average of 370 per year SNI happens in the last two years. Codefication of Harmonize System (HS) in Indonesia refers to Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) per 5 -year revision. The amendment otomatically changed the whole systematic of correlation SNI - HS that had been established so that the equivalent of SNI-HS that is not current (updated). Beside to accommodate these changes, correlation SNI-HS assist and facilitate the standardization policy -making related to industry and trade. This research purposed of composing a correlation valid SNI-HS as a tool to support the development and implementation of SNI in Indonesia. To obtain the valid correlation of SNI-HS used the principle of similarity of products or commodities between SNI and the HS will be correlated. The method used is to close between SNI code with HS codes that have the same product definition or approach then equivalent SNI-HS produced are classified based on the level of compliance / accuracy between SNI products with HS products include: priority 1, priority 2 and priority 3. From 4300 SNI products were identified resulting SNI-equivalent 959 HS verified valid (22.3%) consisting of: 205 equivalent with priority 1, priority 2 matching 444 and 310 equivalent with priority 3. In addition SNI-HS beneficial to the development of: 1) identification of equipment products with high import values, 2) identification of gaps tools about scope SNI products compared to the variety of products in the HS through PNPS preparation, and 3) Equipment identification number of opportunities, threats and power through incoming notifications. Last SNI - HS benefit SNI implementation: 1) Equipment HS code identification of SNI products that will be required and 2) identification of equipment availability Ls-Pro of a product with a high value of import.*

**Keywords:** *Harmonize System* (HS), HS correlation SNI, SNI development, implementation of SNI.

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah SNI berkembang dengan sangat cepat, penambahan SNI rata-rata mencapai 370 SNI (revisi dan baru) per tahun dalam dua tahun terakhir termasuk SNI. Disisi lain nomor kodifikasi HS dalam buku tarif bea masuk Indonesia direvisi setiap 5 tahun sekali sesuai dengan perubahan dan pertumbuhan perdagangan. Perubahan tersebut mengubah seluruh sistematika korelasi SNI-HS yang telah disusun selama ini sehingga dapat dikatakan bahwa hasil korelasi SNI-HS yang ada saat ini sudah tidak mutakhir (*update*). Sistem korelasi ini sangat membantu dan memudahkan pengambilan keputusan bagi kebijakan standardisasi terkait dengan perkembangan perdagangan dan industri.

Korelasi SNI-HS mempunyai peran yang cukup penting dalam membantu mengenali produk ekspor atau impor terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses *outgoing notification* dan *incoming notification* merupakan salah satu contoh peran dari korelasi SNI-HS ini. Proses tersebut membantu dalam proses pengambilan kebijakan strategis bagi manajemen puncak di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Korelasi SNI-HS berguna membantu analisis produk perdagangan dan SNI yang tersedia, analisis ancaman produk asing terhadap pelaku usaha dan upaya analisis resiko pemberlakuan SNI wajib dan sebagainya. Melalui analisis gap ruang lingkup antara SNI dengan HS juga dapat diperoleh potensi produk-produk yang dapat diusulkan untuk dirumuskan SNI dalam PNPS dengan mempertimbangkan produk akhir dengan nilai impor yang cukup tinggi dengan mencoba menambahkan unsur *national differences* didalamnya dan masih banyak manfaat lain dari korelasi SNI-HS ini.

Namun permasalahannya adalah belum ada penelitian yang memberikan bukti bahwa korelasi SNI-HS digunakan dalam konteks pengembangan dan penerapan SNI. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha mengeksplorasi sejumlah bukti empirik yang membuktikan bahwa penyusunan korelasi SNI-HS ini berguna bagi pengembangan dan penerapan SNI.

Untuk membuktikan hal tersebut maka penelitian ini secara spesifik berusaha memaparkan bagaimana korelasi SNI-HS berguna untuk: 1) pengembangan SNI dan 2) penerapan SNI. Bagian pertama dari penelitian ini akan menganalisis bagaimana korelasi SNI-HS dapat memberikan manfaat dari sisi pengembangan SNI, dimulai dengan pembahasan mengenai penyusunan PNPS,

disana dibahas bahwa gap yang terjadi antara korelasi SNI-HS dapat digunakan sebagai daftar produk yang berpotensi untuk diusulkan dirumuskan sebagai SNI maka apabila perumusan SNI didasarkan pada pertimbangan produk dengan nilai impor tinggi maka ini disebut sebagai bagian dari penguatan SNI untuk melindungi produk dalam negeri yang sejenis. Kemudian apabila didasarkan pada parameter berupa produk berorientasi ekspor maka ini disebut sebagai bagian dari SNI mendukung kualitas produk ekspor. Selain itu korelasi SNI-HS pun digunakan untuk menafsirkan sejumlah produk yang dinotifikasikan oleh negara lain (*incoming notification*) yang kemudian dapat digunakan untuk analisis penguatan SNI dengan menambahkan unsur *national differences* atau K3L.

Dari sisi penerapan SNI, korelasi SNI-HS membantu instansi/lembaga teknis dalam menterjemahkan produk-produk yang akan diberlakukan secara wajib ke dalam kode HS yang diakui secara internasional. Kemudian korelasi SNI-HS ini berguna membantu mengidentifikasi SNI dari suatu produk impor yang diketahui kemudian dari situ dapat diketahui LsPro yang tersedia.

Sistematika penulisan penelitian ini yang pertama adalah pendahuluan, di bagian ini dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi diangkatnya permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu juga dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini sekaligus tujuan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yang kedua adalah tinjauan pustaka, pada bagian ini dipaparkan sejumlah teori, pendapat dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan memandu pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian berikutnya adalah metode, pada bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yang memaparkan: metode korelasi yang digunakan, metode pengklasifikasian korelasi yang dihasilkan dan metode analisis yang digunakan. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, pada bagian ini dipaparkan hasil sintesa penulis terhadap terhadap hasil yang diperoleh dan direfleksikan terhadap teori dan pendapat dalam tinjauan pustaka. Kemudian hasil pembahasan ditutup dengan kesimpulan dan saran, pada bagian ini merupakan simpulan dari seluruh paragraf analisis yang dilakukan dan hasil simpulan tersebut diberikan beberapa saran yang relevan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait meliputi: industri, pakar, akademisi, pemerintah, dan masyarakat dengan memperlihatkan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP 102, 2000) sedangkan standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak (PP 102, 2000).

Perumusan suatu standar produk merupakan proses menentukan spesifikasi teknis atau persyaratan teknis produk, dilakukan dengan pendekatan ilmiah sehingga standar yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara kuantitatif maupun substansi standarnya. Pendekatan ilmiah yang dilakukan merupakan upaya menjadikan standar yang dihasilkan lebih berkualitas. Penekanan pendekatan ilmiah adalah dititikberatkan pada bagaimana spesifikasi teknis atau persyaratan teknis yang dibuat dalam standar tersebut mampu membawa misi standar yaitu memberikan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) sekaligus mampu menaikkan nilai tambah produk tersebut dan dampaknya menjadi alat pengerem produk impor. Salah satu upaya mendorong perumusan SNI dengan pendekatan ilmiah adalah dengan melakukan penelitian atau mengumpulkan sejumlah penelitian ilmiah yang menyusun spesifikasi teknis suatu produk yang diakui secara internasional, memasukkan unsur K3L dan menyisipkan unsur kekhasan nasional (*national differences*) namun industri nasional mampu melaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam

penelitian spesifikasi teknis tersebut adalah korelasi SNI-HS.

Harmonized system (HS) adalah kodefikasi produk atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional yang merupakan adopsi Dirjen Bea Cukai dari World Customs Organization (WCO). Peran HS terkait dengan penetapan tarif bea masuk impor barang yang dikenal dengan Buku Tarif Bea Masuk Impor (BTBMI). Selain itu HS digunakan untuk menotifikasikan produk yang akan diberlakukan penerapannya secara wajib dalam bentuk peraturan menteri terkait.

Dalam perkembangannya yang awalnya kode HS digunakan sebagai alat untuk mengklasifikasikan barang yang diperdagangkan antar negara kini telah dimanfaatkan oleh WTO dalam mekanisme notifikasi pemberlakuan regulasi secara wajib dari suatu negara. Kode HS digunakan sebagai kode yang menggolongkan suatu produk yang dinotifikasi masuk dalam suatu produk yang telah diklasifikasikan dalam HS dan memiliki interpretasi atau uraian dan penjabaran karakteristik produk yang seragam, detil dan lengkap. Pemisahan klasifikasi produk dibagi atas kesamaan regional dan nasional. Kode HS seluruhnya mencerminkan klasifikasi produk secara universal yang mana 6 digitnya merupakan kode produk secara internasional, 8 digitnya merupakan kode produk secara regional (ASEAN dalam hal ini) dan 10 digitnya merupakan variasi produk secara nasional. Mengingat pentingnya kode HS ini maka menjadi sangat bermanfaat apabila SNI mencoba melakukan pendekatan terhadap klasifikasi HS. Meskipun pada dasarnya adalah jauh berbeda baik secara tujuan, prinsip, dan sejarahnya namun upaya pendekatan antara SNI dengan HS melalui korelasi SNI-HS penting untuk dilakukan karena ketika telah diberlakukan wajib maka identifikasi barang impor masuk ke tanah air bukan lagi menggunakan definisi SNI namun menggunakan kode HS. Berikut ini disajikan perbedaan antara SNI dengan HS.

Tabel 1 Perbedaan SNI dengan HS.

SNI	Perbedaan	HS
	Kodefikasi	Fungsi
Produk, Sistem dan Jasa	Ruang lingkup	Klasifikasi dan kodefikasi
Mengikuti ICS	Bidang	Produk
8 – 15 digit	Jumlah angka kode	Mengikuti pola HS
BSN	Organisasi penyusun	10 digit
1993	Tahun dibuat	WCO
Berkembang sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	Sifat	1952
		Berkembang berdasarkan varian komoditi perdagangan

(sumber: hasil peneliti, 2013)

Persamaan antara SNI dengan HS adalah produk. Adapun SNI yang tidak terkait dengan produk atau komoditi maka tidak menjadi target korelasi. Proses pengembangan SNI memenuhi kriteria permintaan para pemangku kepentingan terutama industri. Terkadang hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam proses pengembangan SNI di BSN. Pengembangan SNI yang dirumuskan hendaknya berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pasar. Perumusan SNI mengacu pada bidang ICS juga hendaknya mengacu pada klasifikasi HS khususnya untuk penyusunan SNI produk, sehingga diharapkan SNI mampu mendukung perdagangan. SNI dapat disusun berdasarkan pada sejumlah produk dengan jumlah impor yang tinggi sebagai upaya SNI sebagai alat saringan arus barang impor yang tidak berkualitas.

Penerapan SNI merupakan tahap lanjutan setelah SNI disusun atau dirumuskan. Khususnya ketika regulasi memberlakukan wajib SNI. Melalui mekanisme notifikasi, hasil korelasi SNI-HS membantu mengidentifikasi kode HS dari suatu SNI produk yang akan dinotifikasikan. Selain itu dalam sertifikasi produk, hasil ini mampu membantu dalam identifikasi Ls-Pro yang sesuai dengan lingkungannya berdasarkan kode HS produk yang tercantum.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pengumpulan Data.

Sebelum dilakukan proses korelasi SNI-HS dilakukan persiapan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam menyusun korelasi SNI-HS. Data yang dipersiapkan meliputi: data SNI 2012 (per 31 Desember) beserta dokumen SNI, data BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) tahun 2012 (per Desember 2012), dokumen *Supplement Explanatory Note* BTKI (EN 2012) dimana data tersebut digunakan untuk mendukung proses penyusunan korelasi SNI-HS. Kemudian data yang diperlukan lainnya adalah sejumlah referensi kepustakaan yang mendukung manfaat korelasi SNI-HS bagi proses perumusan dan pengembangan SNI. Data tersebut meliputi: nilai impor nasional 2013 sejumlah produk utama, data nilai ekspor nasional 2013 sejumlah produk utama, data notifikasi /keberatan negara asing terkait produk ekspor nasional, data penolakan sejumlah produk ekspor nasional di wilayah Eropa/negara asing dan sejumlah data lainnya yang relevan.

#### 3.2 Metode Korelasi.

Penelitian ini bertujuan mendukung pengembangan SNI dan penerapan SNI sebagai bagian penting dalam proses bisnis di BSN. Korelasi SNI-HS adalah korelasi antara SNI produk dengan kode klasifikasi *Harmonized System* (HS), korelasi ini berguna untuk penyusunan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), juga berguna dalam memprioritaskan perumusan SNI produk dengan nilai impor tinggi. Hal ini berguna sebagai bahan analisis penguatan SNI untuk melindungi produk dalam negeri sehingga diharapkan SNI efektif menyaring arus barang impor yang tidak berkualitas.

Metode korelasi SNI-HS adalah menggunakan prinsip kesamaan jenis produk yang akan dikorelasikan. Mekanismenya dengan mempasangkan SNI suatu produk tertentu dengan nomor HS yang sesuai dengan produk dalam SNI tersebut. Jadi secara ilmiah merupakan kegiatan eksploratif-korelatif untuk mendapatkan kesesuaian antara SNI dan HS berdasarkan kesamaan produknya. Adapun tahapan dalam proses korelasi adalah sebagai berikut:

- Persiapan Data.* Data SNI dipersiapkan hingga kodefikasi SNI dapat dibaca dan dimanipulasi dalam program komputer untuk memudahkan dalam proses pengolahan data, demikian juga dengan HS hingga setiap kata dalam judul HS mampu diidentifikasi secara tunggal untuk proses pencarian dan *matching* produk atau komoditi. Data penelitian yang dimaksud adalah data SNI dan HS yang terbaru per 31 Desember 2012. SNI yang akan dikorelasikan dipilih kelompok SNI produk terlebih dahulu. SNI produk adalah SNI yang menjelaskan persyaratan teknis dan mutu suatu produk atau komoditi perdagangan. HS yang dikorelasikan dalam bentuk 10 digit.
- Ketentuan Melakukan Korelasi.* Dalam melakukan korelasi, digunakan prinsip atau kaidah sebagai berikut:

*“Hanya SNI yang menyebutkan suatu produk tertentu yang dapat dikorelasikan dengan HS dengan produk atau komoditi yang sama. Adapun SNI manajemen, SNI Sistem, SNI prosedur dan SNI spesifikasi profesi tidak dapat dikorelasikan dengan HS”*

Perlunya mengkorelasikan SNI dengan tingkat akurasi yang lebih baik disebabkan apabila penetapan korelasi SNI dengan HS yang tidak tepat dapat menimbulkan korelasi yang bias sehingga nantinya dapat menghasilkan analisis

penelitian yang tidak akurat. Untuk itu ditetapkan ketentuan dalam proses mengkorelasikan SNI dengan HS, dalam bentuk kriteria sebagai berikut:

- Setiap nomor SNI dapat mempunyai pasangan nomor HS yang sesuai dengan produk komoditinya atau disebut *one to one*.
- Setiap nomor SNI dapat memiliki lebih dari satu nomor HS atau disebut *one to many*.
- SNI tentang *manajemen* tidak mempunyai korelasi terhadap HS.
- Jumlah digit HS yang digunakan tergantung jenis komoditi dalam SNI, bisa 4, 6, 8, atau 10 digit HS. Semakin umum jenis komoditinya maka semakin kecil digit HS.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, hasil dari korelasi SNI-HS dikelompokkan menjadi:

#### 1) Prioritas 1

Satu SNI memiliki korelasi yang tepat berkorelasi terhadap 1 jenis produk dengan HS yang sesuai (10 digit), contoh: SNI 04-6292.2.25-2003 yaitu peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya -

keselamatan - bagian 2-25: persyaratan khusus untuk oven gelombang mikro termasuk oven gelombang mikro kombinasi. Berkorelasi secara tepat dengan HS 8516.50.00.00 : *Microwave open*.

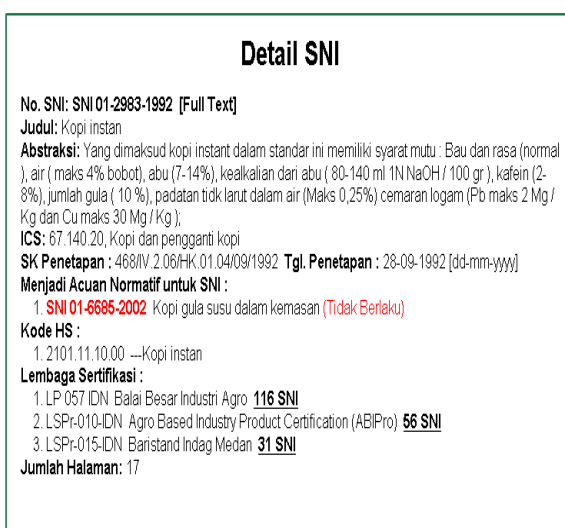
#### 2) Prioritas 2

Satu SNI berkorelasi dengan banyak nomor HS. Hal ini dikarenakan adalah bahwa tidak sedikit SNI yang menyebutkan suatu produk yang tidak spesifik atau (umum/general).

#### 3) Prioritas 3

SNI berkorelasi dengan nomor HS dengan kelompok "lain-lain" yang artinya terdapat beberapa jenis produk yang tidak termasuk dalam kelompok sebelumnya.

Program aplikasi pendukung seperti Database HS 2007 (MS Access), yang merupakan katalog HS yang dirancang dalam bentuk perangkat lunak. Aplikasi ini berfungsi membantu penelusuran komoditi HS, seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Abstraksi SNI dari senarai elektronik 2012.  
(sumber: hasil pengolahan data peneliti, 2013)

### 3.3 Batasan Data.

Diketahui bahwa tidak semua produk yang memiliki SNI merupakan komoditi yang diperdagangkan baik ekspor maupun impor. Disamping itu HS merupakan klasifikasi produk atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Sampai akhir tahun 2012 terdapat 7394 SNI. BSN memiliki kebijakan bahwa SNI yang telah berusia lebih dari 5 (lima) tahun perlu dikaji ulang untuk mengetahui kekinian standar yang bersangkutan. Saat ini telah diidentifikasi sebanyak 4300 SNI produk, namun setelah

dilakukan verifikasi diperoleh 819 SNI bukan merupakan SNI produk melainkan SNI pengujian dan proses. Maka jumlah keseluruhan SNI yang akan dicari korelasinya setelah dikurangi dengan SNI yang bukan produk adalah sebanyak 3481 SNI. Kemudian untuk mendapatkan definisi dari produk yang dikorelasikan digunakan dokumen SNI dan dokumen BTKI tahun 2012. Selain itu dibantu dengan *Supplement Explanatory Note BTKI* (EN BTKI 2012) sebagai dokumen pendukung.

### 3.4 Verifikasi Hasil Korelasi SNI-HS.

Verifikasi SNI-HS tim BSN dilakukan oleh tim Bea Cukai. Evaluasi dilakukan dengan metode kepakaran yang dimiliki oleh pakar Bea Cukai yang dibagi menjadi 4 sektor klasifikasi Harmonized System (HS) yaitu: 1) sektor I HS 1-40, 2) sektor II HS 41-67, 3) sektor III HS 68-83, dan 4) sektor IV HS 84-97. Proses verifikasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMN HS), (Lampiran 2)
2. Mempertimbangkan *Supplementary Explanatory Notes* (SEN), (Lampiran 3)
3. Mempertimbangkan spesifikasi teknis, ruang lingkup, bahan material dan batasan yang disebutkan dalam dokumen SNI.

Sebagai contoh proses verifikasi hasil korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Contoh Proses Verifikasi

SNI	Parameter Verifikasi	HS
SNI 7618:2010	Kode	9026.20.40.00 9028.10.10.00 9028.10.90.00
Regulator tekanan tinggi untuk tabung baja LPG	Judul	-- Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik -- Pengukur gas dari jenis yang dipasang pada kemasan gas -- Lain-lain
Menetapkan tentang bahan baku, rangka konstruksi, syarat mutu, dan metoda uji regulator LPG bertekanan tinggi untuk tabung baja LPG kapasitas 3 kg sampai dengan 12 kg untuk tipe pengancing ( <i>clip on</i> ) dan 50 kg untuk tipe ulir ( <i>hand wheel</i> )	Ruang Lingkup	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, <u>tekanan</u> atau variabel lainnya dari cairan atau gas (9026.20.40.00) atau -- Pengukur gas dari jenis yang dipasang pada kemasan gas (9028.10.10.00) atau -- Pengukur gas dari jenis lain (9028.10.90.00).
Paduan Zn, Kuningan, Karet, Plastik	Bahan pembuat	<i>Tidak didefinisikan</i>
20 plus 0,4 mm	Diameter inlet	<i>Tidak didefinisikan</i>
<< 220 kPa	Tekanan	<i>Tidak didefinisikan</i>

Catatan: Maka SNI 7618:2010 dapat dikorelasikan kepada HS 9028.10.10.00 -- Pengukur gas dari jenis yang dipasang pada kemasan gas. Karena regulator digunakannya dengan cara dipasangkan pada tabung baja gas LPG yang menjadi induknya. Hal tersebut merupakan korelasi yang paling mendekati.

(sumber: hasil pengolahan data peneliti, 2013)

### 3.5 Metode Analisis Hasil.

Penelitian ini memiliki 2 sasaran utama: 1) Menyusun korelasi SNI-HS 2013 yang valid (akurat) dan 2) Membuktikan bahwa korelasi SNI-HS digunakan dalam proses bisnis BSN dalam hal pengembangan dan penerapan SNI. Untuk mencapai sasaran tersebut digunakan metode analisis deskriptif-eksploratif yaitu mengumpulkan sejumlah manfaat korelasi SNI-HS dan implementasinya dalam proses pengembangan maupun penerapan SNI kemudian dipaparkan secara sistematis dengan menguraikan secara detail disertai contoh yang sesuai. Hasil korelasi SNI-HS disajikan dengan statistik deskriptif, meliputi: jumlah SNI yang dikorelasi, jumlah SNI-HS yang terverifikasi, persentase SN-HS menurut sektor ICS, persentase SNI-HS menurut 5 tahun terakhir, dan persentase SNI-HS menurut mandatori.

Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, diagram pie atau grafik. Digunakan metode

eksploratif deskriptif dengan diberikan contoh-contoh yang memperkuat pemanfaatan korelasi SNI-HS ke arah perumusan dan pengembangan standar. Hasil analisis menyajikan pemikiran bahwa korelasi SNI-HS berguna dalam penyusunan PNPS. Dalam proses tersebut dapat dilihat ketepatan hasil korelasi. Analisis kedua diarahkan untuk pemanfaatan dalam proses sertifikasi produk, seperti ketersediaan Ls-Pro yang sesuai.

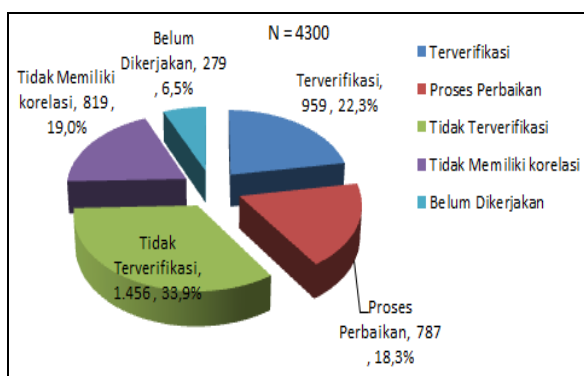
## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Korelasi SNI-HS.

Korelasi SNI terhadap kode HS yang dilakukan menghasilkan 959 korelasi. Dari 4300 SNI yang diidentifikasi sebagai SNI produk diperoleh: 959 korelasi terverifikasi (22,3%), 787 korelasi dalam proses perbaikan (18,3%), 1456 korelasi belum diverifikasi (33,9%), 819 SNI tidak memiliki

korelasi (19%) dan 279 SNI belum dikerjakan (6,5%).

Kualitas korelasi HS yang baik akan berpengaruh pada kualitas analisis penelitian standardisasi yang menggunakan korelasi SNI-HS. Korelasi HS yang dihasilkan tersebar ke beberapa sektor, diantaranya sektor HS 01 (binatang hidup), HS 03 (ikan dan hewan berkulit keras), HS 08 (Buah-buahan dan sayur mayur), HS 28 (Bahan kimia), HS 44 (Kayu dan produk kayu), HS 69 (Produk keramik), HS 73 (Barang-barang dari besi dan baja) dan lain sebagainya. Adapun sektor yang belum masuk tersebut meliputi: HS 20 (sayur dan buah), HS 26 (Biji-bijian dan pohon kayu keras), HS 30 (Obat-obatan), HS 37 (Barang-barang fotografis), HS 41 (Jangat dan kulit), HS 43 (Bulu), 45 (Gabus), 46 (Jerami dan keranjang), 50 (Sutera), 51 (Wol), HS 53 (Serat tekstil), HS 54 (Kawat pijar), 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96 dan 97.



Gambar 2 Hasil korelasi SNI-HS 2013.  
(sumber: data peneliti diolah, 2013)

Hasil korelasi SNI-HS dikelompokkan menjadi prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Hasil korelasi SNI-HS dengan prioritas 2 sebanyak 444 korelasi adalah yang paling banyak dan korelasi SNI-HS dengan prioritas 1 sebanyak 205 korelasi adalah yang paling

sedikit. Adapun secara lengkap menghasilkan korelasi sebagai berikut:

Tabel 3 Korelasi SNI-HS menurut prioritas

Prioritas	Jumlah Korelasi	Persen (%)
1	205	21.4
2	444	46.3
3	310	32.3
Total	959	100

(sumber: hasil pengolahan data peneliti, 2013)

#### 4.2 Manfaat SNI-HS Mendukung Perumusan dan Pengembangan SNI.

PNPS merupakan program utama kinerja BSN di bidang standardisasi untuk mendukung pilar pertama dalam Sistem Standardisasi Nasional yaitu perumusan standar. Dalam proses pengusulan standar tersebut diantaranya mempertimbangkan keberadaan referensi utama standar dan industri yang akan menerapkannya.

Adapun untuk meningkatkan daya saing produk nasional dari produk impor yang masuk ke pasar dalam negeri. Bentuk implementasi konsep di atas dilakukan dengan cara setiap HS impor yang tinggi dibutuhkan SNI produknya. Untuk perbaikan kualitas produk dalam negeri, perlindungan masyarakat dan lingkungan dari produk substandar yang membahayakan keamanan, keselamatan dan kesehatan maka dirumuskan SNI.

Perumusan SNI dapat dengan pertimbangan bahwa produk tersebut beresiko tinggi, produk warisan budaya bangsa, produk yang mengandung perbedaan nasional (*national differences*) terhadap produk di negara lain dengan asumsi bahwa kesetaraan kemampuan produsen dalam negeri terhadap produsen luar negeri sudah homogen. Sebagai contoh menunjukkan impor nonmigas Indonesia tahun 2013, seperti pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Analisis prioritas produk impor

No	Produk HS dan kode HS	Resiko Tinggi	Warisan Budaya	National Differences	% Nilai Impor	Negara Asal Impor	Bobot Total
1	Mesin dan listrik (85)	✓	-	✓	13,17%	Cina, Jepang, Thailand	2
2	Kendaraan bermotor & bagiannya (87)	✓	-	✓	5,78%	Jepang, Cina, Thailand	2
3	Mesin dan peralatan mekanik (84)	✓	-	-	18,75%	Cina, Jepang, Thailand	1
4	Besi dan Baja (72)	✓	-	-	7,5%	Cina, Jepang, Thailand	1
5	Plastik dan Barang plastik (39)	✓	-	-	5,26%	Cina, Jepang, Thailand	1

(Sumber: BPS, 2013, diolah kembali)

Data memperlihatkan bahwa produk HS 85 dan 87 dalam tabel analisis di atas memiliki bobot kepentingan yang lebih besar dari yang lain. Maka fokus penguatan SNI dalam rangka membentengi pasar lokal adalah tertuju pada produk HS 85 dan 87. Disinilah letak pentingnya kode HS yang dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam SNI produk melalui korelasi SNI-HS. Korelasi SNI-HS memudahkan peneliti melakukan analisis terkait dengan kebutuhan pasar, rencana penerapan SNI secara wajib, potensi importir untuk sertifikasi SNI wajib dengan mudah teridentifikasi melalui kode HS yang ada. Data dalam Tabel 4 di atas adalah sebuah contoh kasus dimana kondisi impor produk mesin listrik dan kendaraan bermotor nasional mendominasi. Maka praktis retensi munculnya produk tersebut secara tidak standar menjadi besar. Fakta membuktikan bahwa produk suku cadang pembangkit listrik buatan Cina memiliki kualitas yang rendah. Suku cadang buatan Cina memiliki masa hidup yang cukup pendek dibanding produksi negara-negara Eropa atau Amerika Serikat. (Bintatar, 2010). Produk mainan anak dari Amerika Serikat, PT. Mattel yang pabriknya di Cina menarik produknya dari pasar seluruh dunia karena

diindikasikan menggunakan bahan cat yang berkadar timah hitam terlalu tinggi dan hal itu membahayakan kesehatan. (kabarindonesia, 2007). Fakta lain menyebutkan bahwa pemerintah Selandia Baru telah melakukan penelitian terhadap kualitas garmen yang diimpor dari Cina. Sejumlah besar kaos oblong, celana dan piyama ditemukan mengandung zat dalam kadar tinggi yang dapat mengakibatkan kanker (kabarindonesia, 2007). Produk kendaraan bermotor penting, karena produk kendaraan bermotor merupakan produk dengan resiko bahaya cukup tinggi terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, selain itu karena nilai impor yang cukup tinggi dan produk tersebut dapat ditambahkan konten *national differences* seperti: kondisi jalan, beban muatan maksimum dan kondisi cuaca dan lain sebagainya.

Mengharmoniskan perumusan SNI produk mengacu pada kodefikasi HS sebagai potensi untuk diusulkan sebagai standar nasional Indonesia dengan mempertimbangkan nilai potensi ekspor/impor yang dimiliki dan berdasarkan suara permintaan produsen merupakan manfaat lain dari korelasi SNI-HS ini (Tabel 5).

Tabel 5 Potensi perumusan SNI untuk produk baru berdasarkan klasifikasi HS.

HS	Judul HS	Produk	SNI	Judul SNI
2701	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	Batubara	SNI 13-3477-1994 SNI 13-3476-1994 SNI 13-3481-1994	Batubara secara umum
2701.11.00.00	- - Antrasit		<i>Belum ada</i>	<b>POTENSI</b>
2701.12.10.00	- - - Batu bara bahan bakar		SNI 13-3477-1994 SNI 13-3476-1994 SNI 13-3481-1994	Batubara secara umum
2701.12.90.00	- - - Batu bara selain bahan bakar		<i>Belum ada</i>	<b>POTENSI</b>
2701.19.00.00	- - Batu bara lainnya		<i>Belum ada</i>	<b>POTENSI</b>
2701.20.00.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara		SNI 4931:2010	Briket batubara klasifikasi, syarat mutu dan metode pengujian
2704	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.	Kokas	SNI 13-6339.5-2001 SNI 13-3603-1994 SNI 13-3602-1994 SNI 13-3604-1994 SNI 13-4700-1998 SNI 13-6339.5-2001 SNI 13-3603-1994	Kokas secara umum
2704.00.10.00	- Kokas dan semi kokas dari batu bara		<i>Belum ada</i>	<b>POTENSI</b>
2704.00.20.00	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk		<i>Belum ada</i>	<b>POTENSI</b>
2704.00.30.00	- Retort carbon		<i>Belum ada</i>	<b>POTENSI</b>

(sumber: hasil pengolahan data peneliti, 2013)

Industri yang orientasinya pasar luar negeri dan dalam negeri maka dapat saja menerapkan standar ganda disesuaikan dengan negara tujuan distribusi produknya. Namun hal ini tentunya akan merugikan pasar dalam negeri apabila spesifikasi yang ditetapkan untuk pasar dalam negeri lebih rendah daripada pasar luar negeri. Akan tetapi apabila hal tersebut merupakan mekanisme permintaan pasar (*attractive market*) maka tidak ada yang salah dalam hal ini karena selama belum diberlakukan secara wajib maka belum ada aturan yang mengikat. Dengan demikian penerapan standar ke depan harus bersamaan dengan penciptaan kapabilitas industri yang mampu memenuhi spesifikasi standar.

Sebagai contoh lain pemanfaatan korelasi SNI-HS adalah memanfaatkan notifikasi masuk (*incoming notification*) sebagai pertimbangan kebijakan perbaikan spesifikasi teknis dalam SNI. Metodenya dengan cara mengidentifikasi sejumlah notifikasi masuk dari negara asing yang didalamnya terkait dengan produk atau komoditi ekspor nasional yang cukup tinggi dan diduga dapat mengganggu jumlah arus ekspor ke negara tersebut. Informasi dari notifikasi tersebut berupa notifikasi sejumlah regulasi yang diberlakukan oleh sebuah negara terkait dengan produk yang diekspor ke negara tersebut. Daftar regulasi tersebut harus dipelajari secara mendalam melalui dokumen regulasi yang dimaksud, kemudian kode HS yang tercantum dalam lembar notifikasi masuk digunakan untuk menterjemahkan definisi dan karakteristik produk yang dinotifikasikan.

1. Komoditi minyak sawit mentah (HS 1511.10.00.00).

Minyak sawit menjadi komoditi primadona nasional. Indonesia menempatkan diri sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2011 Indonesia menguasai pasar minyak sawit mentah dunia sebesar 47% mengungguli Malaysia di tempat ke 2 dengan 39%. Ekspor kelapa sawit mampu menyumbang devisa Negara sebesar USD 14 miliar pada tahun 2010 dan diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan dari tahun ketahunnya (nico03soil.com, 2012). Laju pertumbuhan rata-rata volume ekspor kelapa sawit selama 2007-2012 sebesar 12,19% per tahun dengan peningkatan nilai ekspor rata-rata 22,24% per tahun. Realisasi ekspor komoditas kelapa sawit tahun 2012 telah mencapai volume 20,57 juta ton (minyak sawit/CPO dan minyak sawit lainnya) dengan nilai US \$19,35 milyar. Neraca perdagangan untuk komoditas kelapa sawit tahun 2012 telah mencapai US \$19,34

milyar (ditjenbun.deptan.go.id, 2013). Dengan demikian komoditi minyak sawit mentah (CPO) menjadi penting untuk dianalisis. Pada tahun 2010, India merupakan negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dengan nilai ekspor terbesar, disusul kemudian Malaysia dan selanjutnya adalah Belanda.

Tabel 6 Ranking ekspor minyak sawit mentah Indonesia 2010.

HS	Negara Tujuan	Nilai (US\$)	Persen Kontribusi
1	India	3,629,076,473	47.4%
2	Malaysia	1,059,891,005	23.6%
3	Netherlands	800,848,886	23.2%
4	Italy	474,097,791	17.7%
5	Singapore	460,368,142	20.7%
6	Germany, Fed. Rep. Of	240,290,580	13.6%
7	Spain	230,485,099	15.0%
8	Viet Nam	145,301,949	11.2%
9	Ukraine	130,266,214	11.3%
10	China	93,832,074	7.3%
11	United State Of America	2,750,000	0.2%

(sumber: BPS, 2010, diolah kembali)

2. Notifikasi masuk dari beberapa negara terkait minyak sawit mentah.

Berdasarkan hasil penelusuran di website: www.wto.org, diperoleh informasi bahwa tidak ada satu pun notifikasi dari India, Malaysia dan Belanda serta beberapa negara Eropa lain terkait ekspor produk minyak sawit mentah Indonesia ke negara tersebut, baik notifikasi regulasi minyak sawit mentah maupun notifikasi yang bersifat keberatan terhadap pemberlakuan regulasi minyak sawit mentah di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa komoditi minyak sawit nasional sudah mendapatkan pengakuan standar internasional. Hanya pada tahun 2012 Amerika Serikat melakukan penolakan terhadap ekspor minyak sawit bukan dikarenakan produknya tidak standar atau bersertifikasi ISPO melainkan karena dianggap tidak ramah lingkungan, dan hanya dapat menurunkan kadar emisi gas rumah kaca kurang dari 20%. Artinya ini tak sesuai yang disyaratkan dalam NODA EPA (*Notice of Data Availability Environmental Protection Agency's*) (Rista Rama Dhany, 2012). Namun penolakan ini tidak mempunyai efek signifikan terhadap volume ekspor sebab Eropa tidak menggunakan aturan tersebut selain itu persen kontribusi ekspor minyak sawit ke Amerika Serikat cukup kecil sebesar 0,2%. Selain itu pada tahun 2011, Indonesia mendapatkan surat peringatan penolakan produk ekspor produk turunan CPO berupa *palm oil stearin* (HS 1511909030) ke

negara Belanda. Permasalahannya adalah produk *palm oil stearin* tersebut diindikasikan mengandung racun berbahaya melebihi ambang batas yang diperkenankan yaitu berupa *Benzoapyrene*, yaitu sebesar 8 µg/kg – ppb dari 4,1 µg/kg – ppb yang diperkenankan (RASFF, 2012). Maka perlu dipelajari aturan yang dipersyaratkan oleh NODA EPA USA terkait dengan komoditi ekspor unggulan nasional Indonesia ke Amerika Serikat dan perlu ditambahkan batasan teknis kandungan *Benzoapyrene* dalam minyak sawit stearin ini. Pemanfaatan korelasi SNI-HS sebagai alat pendukung pengembangan SNI dengan cara memperbaiki spesifikasi SNI yang diberlakukan wajib dengan menggunakan informasi notifikasi masuk atau data penolakan produk Indonesia di Eropa. Sebagai contoh adalah produk *crude palm oil* itu memiliki kode HS 1511.90.90.00, kemudian korelasinya terhadap SNI diperoleh yaitu SNI 01-0021-199, RBD Palm stearin. Dalam dokumen SNI tersebut belum dicantumkan batasan kandungan *Benzoapyrene* sehingga dalam hal ini dapat diusulkan untuk ditambahkan dalam spesifikasi mutu SNI dalam kaji ulang terhadap SNI tersebut.

Pemanfaatan korelasi SNI-HS lainnya adalah melalui pemanfaatan data dan informasi yang tersedia dalam website: [www.tbt.bsn.go.id](http://www.tbt.bsn.go.id), berupa daftar notifikasi masuk dari negara lain (*Notification from other Countries*). Pada tahun 2010, perdagangan ekspor helm pengaman pengendara sepeda motor terbesar adalah ditujukan kepada negara Italia (HS 6506.10.10.00) dengan nilai ekspor sebesar 4,65 juta US dollar dan urutan kedua berikutnya adalah diekspor ke Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 430 ribu US dollar. Maka apabila dalam perjalanannya, Italia menyampaikan sebuah notifikasi regulasi terkait produk helm keselamatan tersebut (HS 6506101000), maka dapat paling tidak mengikuti kaidah sebagai berikut:

- a) Apabila spesifikasi regulasi Italia = regulasi Indonesia maka tidak masalah. Kondisi ini disebut *zero barrier*.
- b) Apabila spesifikasi regulasi Italia > regulasi Indonesia maka tantangan. Ini mempunyai makna bahwa spesifikasi yang dipersyaratkan di Italia lebih dari yang dipersyaratkan di Indonesia, namun Indonesia masih dapat memenuhinya. Cara memenuhinya adalah dapat dengan melakukan penambahan atau modifikasi parameter spesifikasi sesuai dengan regulasi helm di Italia. Namun harus juga memperhatikan nilai kekhasan nasional atau *national differences* untuk mempertahankan fungsi SNI sebagai pelindung pasar lokal.

- c) Apabila spesifikasi regulasi Italia < regulasi Indonesia maka peluang. Kondisi ini mengakibatkan penetrasi pasar yang lebih besar ke pasar Italia.
- d) Apabila spesifikasi regulasi Italia >> regulasi Indonesia maka ancaman. Kondisi ini artinya kedua belah pasar memiliki perbedaan regulasi yang sulit untuk dipertemukan dalam kesepakatan. Umumnya kondisi seperti ini masuk dalam ranah pengadilan perdagangan internasional dimana sebelumnya kedua belah negara telah melaksanakan notifikasi keberatan (*dispute settlement*).

#### 4.3 Manfaat SNI-HS Mendukung Penerapan SNI.

##### 4.3.1 Proses Notifikasi Standar Produk.

Dalam notifikasi keluar atau biasa disebut (*outgoing notifications*), di dalamnya terkandung informasi produk atau barang yang akan dinotifikasikan yang dikodekan mengikuti klasifikasi HS yang dikeluarkan oleh WCO. Maka apabila suatu negara akan menotifikasikan sejumlah regulasi terkait dengan produk atau barang yang diregulasi wajib maka produk tersebut harus diterjemahkan terlebih dahulu dalam bentuk kode HS. Apabila SNI produk yang dihasilkan melalui BSN sudah memiliki kode HS yang valid maka akan meningkatkan nilai tambah SNI sebagai alat pendukung meningkatkan akurasi produk yang akan diberlakukan secara wajib. Sebagai contoh pada 19 Juli 2013, Indonesia menotifikasikan pemberlakuan secara wajib SNI 7709:2012 minyak goreng sawit berdasarkan Keputusan Kementerian Perindustrian mengenai Pemberlakuan Wajib SNI Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2012) dengan lingkup produk meliputi:

- a) Ex. 1511.90.92.00, Minyak kelapa sawit dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 20 kg.
- b) Ex. 1511.90.99.00; Minyak kelapa sawit dalam kemasan dengan berat bersih melebihi 20 kg
- c) Ex. 1516.20.98.00, Minyak dan lemak nabati serta fraksinya.

Berdasarkan hasil identifikasi selama tahun 2000 – 2012 tercatat terdapat 133 notifikasi yang dilakukan oleh Indonesia berupa pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia. Dari 133 notifikasi tersebut 77 notifikasi (58%) ternyata menggunakan HS dalam mendefinisikan produknya dan 56 notifikasi (42%) tidak menggunakan HS. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan notifikasi TBT WTO di BSN membutuhkan

padanan SNI dengan HS yang serius. Maka apabila pencantuman HS tersebut sudah dilakukan sejak perumusan SNI yang kemudian dituliskan dalam dokumen SNI maka ini sangat efisien dan mempermudah pemerintah dalam proses notifikasi dan memudahkan industri mengelompokkan produknya ke dalam SNI yang dibutuhkannya.

#### 4.3.2 Sertifikasi Produk.

Pada tahun 2010, Indonesia mengimpor produk ban mobil penumpang (HS 4011100000) sebesar 36 juta US dollar dengan nilai impor terbesar dari negara Thailand (39%), Jepang (18%) dan Korea Selatan (15%) serta China (14%) (BPS, 2013). Saat itu Indonesia telah memberlakukan regulasi wajib untuk SNI Ban Kendaraan Bermotor (SNI 06-0098-2002). Maka setelah diketahui SNI-nya dapat ditelusuri ketersediaan Lembaga Sertifikasi Produknya (LSPro). Dan hasilnya terdapat 8 LSPro yang dapat menguji produk SNI 06-0098-2002. Informasi ini bermanfaat bagi pelaku importir yang memang fokus terhadap standar. Dengan demikian meskipun ini mendukung kelancaran perdagangan impor namun potensi kemudahan bagi pelaku usaha yang konsisten terhadap SNI harus tetap dapat diciptakan oleh BSN sebagai badan standardisasi nasional yang adil dan transparan.

Tabel 7 LSPro yang tersedia untuk produk ban kendaraan bermotor (SNI 06-0098-2002)

No	LSPro	Alamat
1	Pusat Pengujian Mutu Barang	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur, Telpon : (021) 8710321-3
2	Pustan Deprin	Jl. Jend. Gatot Subroto Lt. 20, Jakarta, Telpon : (021) 5255509
3	Jogja Product Assurance (JPA)	Jl. Sokonandi No. 9, Yogyakarta
4	Baristand Indag Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Telpon : (031) 8410054
5	PT. TUV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia. Jl. Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tower F part of 7th floor, suite 704. jakarta Selatan 12520, Indonesia
6	Balai Besar Barang dan Barang, Teknik (B4T)	Jl Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telpon : (022) 2504088
7	LUK B2TKS	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang 15314
8	PT. TUV Rheinland Indonesia	Menara Karya Lt. 10, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X - 5, Kav. 1 - 2

(sumber: *sisni.bsn.go.id*, per 29 Januari 2014)

#### SNI Sukarela

Pada tahun yang sama, Indonesia memiliki potensi ekspor produk yang cukup menjadi

unggulan yaitu produk kayu lapis (HS 4412310000) dengan nilai ekspor sebesar 406,6 juta US dollar dengan tujuan Jepang dan neraca perdagangan surplus artinya nilai ekspor yang cukup tinggi dan nilai perdagangan impor yang lebih rendah dari ekspor. Maka dengan menggunakan hasil korelasi SNI-HS didapat bahwa produk kayu lapis (HS 4412.31.00.00) memiliki padanan SNI yaitu: SNI 7732.1:2011 dengan judul: Venir jenis jati - Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan. Dalam perdagangan ekspor maka produsen harus memenuhi persyaratan mutu negara tujuan ekspor. Produk kayu lapis, tentunya harus memenuhi standar Jepang sehingga terdapat 2 hal yang dapat dianalisis yaitu:

- Seberapa jauh dokumen SNI harmonis dengan standar Jepang? Semakin harmonis SNI maka semakin mudah keberterimaan produk kayu lapis di Jepang. Indikatornya adalah berapa banyak standar Jepang yang menjadi acuan referensinya. Setelah diidentifikasi dalam dokumen SNI tersebut mengacu pada SNI ISO 2426.1:2008: Kayu lapis – klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan – Bagian 1:Umum.
- Seberapa jauh LSPro kita mampu memenuhi kebutuhan permintaan sertifikasi para eksportir? Maka berdasarkan hasil penelusuran diperoleh hasil bahwa tidak diperoleh satu pun LSPro yang memiliki ruang lingkup untuk mensertifikasi produk venir jenis jati (SNI 7732.1:2011).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut bahwa korelasi SNI terhadap kode HS yang dilakukan menghasilkan 959 korelasi terverifikasi valid (22,3%). Kemudian 959 korelasi SNI terhadap kode HS tersebut menghasilkan 205 korelasi atau (21,4%) dengan prioritas 1, 444 korelasi atau (46,3%) dengan prioritas 2 dan 310 korelasi atau (32,3%) dengan prioritas 3. Hasil memperlihatkan bahwa masih banyak produk yang dirumuskan dalam SNI, belum harmonis dengan lingkup produk dalam HS. Hanya 205 SNI yang sesuai dengan HS (21,4%). Bagi proses pengembangan dan penerapan SNI, korelasi SNI terhadap kode HS memberikan manfaat berupa: 1) Alat identifikasi produk dengan nilai impor tinggi untuk pengutan SNI, 2) Alat identifikasi gap ruang lingkup SNI produk dibandingkan dengan variasi produk dalam HS melalui penyusunan PNPS, 3) Alat identifikasi SNI produk untuk sebagai daya saing, dan 4) Alat identifikasi sejumlah peluang ancaman dan kekuatan melalui notifikasi masuk (*incoming*)

notification) untuk memperbaiki kualitas SNI dengan menambahkan *national differences*, fortifikasi, atau unsur K3L, d) Korelasi SNI terhadap kode HS memberikan manfaat bagi penerapan SNI sebagai alat identifikasi kode HS dari SNI produk yang akan diwajibkan oleh Pemerintah dan identifikasi ketersediaan LSPRO dari suatu produk dengan nilai perdagangan impor tinggi yang berguna untuk pengembangan lembaga sertifikasi produk yang memfasilitasi impor. Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan suatu rekomendasi sebagai berikut: a) Mengingat bahwa kodifikasi dalam HS bersifat selalu diperbarui, maka kegiatan ini perlu diulang setiap interval waktu tertentu untuk mengikuti perubahan (edisi terbaru) dari BTKI, b) Metode korelasi diperbaiki dan pola kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya yang berskala nasional harus selalu digunakan untuk menghasilkan korelasi SNI-HS yang disertai dengan penjelasan kronologisnya, yang pada akhirnya akan dapat mendorong dihasilkannya korelasi SNI dengan HS yang lebih akurat lagi, c) Sebanyak 819 SNI yang tidak memiliki korelasi atau diidentifikasi bukan merupakan SNI produk disarankan untuk ditinjau ruang lingkup SNI tersebut terhadap statusnya sebagai SNI produk sehingga definisi SNI produk akan lebih jelas dan akurat, d) Sebanyak 787 korelasi (18,3%) yang dalam proses perbaikan dan 1456 korelasi (33,9%) yang belum dilakukan verifikasi atau total sekitar 52,2% diharapkan dapat dilanjutkan dengan mengutamakan SNI dengan batas 5 tahun terakhir untuk memudahkan mendapatkan hasil dan didahulukan pada SNI yang terbaru juga diprioritaskan SNI produk yang telah diberlakukan wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2013): *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juni 2013*, *Berita Resmi Statistik*, No.49/08/Th.XVI 2013, Jakarta, diakses tgl. 21 Januari 2014 dari <http://www.bps.go.id>
- BSN (2012): *Daftar Standar Nasional Indonesia (SNI) per 31 Desember 2012*, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Jakarta Pusat.
- Dhany, Rista R. (2012): *Ini Alasan Indonesia Tak Terima CPO-nya Dicekal AS*, Detik Finance, Jakarta, Diakses tgl. 14 Februari 2012 dari <http://finance.detik.com>.
- Ditjenbun.deptan.go.id, (2013): *Kelapa Sawit Sumbang Ekspor Terbesar Untuk Komoditas Perkebunan*, Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta, diakses tgl.

22 Januari 2014 dari <http://ditjenbun.deptan.go.id>.

- Ditjen.Bea Cukai (2012): *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
- Khaerudin, (2010): *Suku Cadang Pembangkit Listrik Produk China Berkualitas Rendah*, Media Massa Kompas, diakses tgl. 21 Januari 2014 dari <http://bola.kompas.com>
- Nico03soil.com, (2012): *Lima Komoditas Pertanian dan Perkebunan Indonesia Yang Mendunia*, diakses tgl. 22 Januari 2014 dari <http://nico03soil.wordpress.com>.
- Rapid Alert System for Food and Feed, (2013): *Database Good Refusal for Crude Palm 11Oil Country Origin from Indonesia 2000 – 2012*, RASFF, Jenewa, Swiss, diakses tgl. 22 Januari 2014 dari [www.rasff.org](http://www.rasff.org).
- Redaksi, (2007): *Merosotnya Citra Produk Buatan Cina, Kabar Indonesia*, Jakarta, diakses tgl. 21 Januari 2014 dari <http://www.kabarindonesia.com>
- WCO (2012): *Supplementary Explanatory Note (SEN) Harmonized System (HS)*, World Custom Organization (WCO), Jenewa, Swiss.